



**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH)**

Fredericho Mego Sundoro¹⁾ ; Yohanes Suhardjo²⁾
Fredericho.sundoro@gmail.com¹⁾; yohanes.suhardjo.ca@gmail.com²⁾

Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Dikirim : 06/09/2021

Diterima: 07/09/2021

Dipublikasikan:10/09/2021

ABSTRAK

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat fenomena proporsi belanja modal terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia yang masih rendah yaitu hanya sebesar 20,28%. Dengan mengetahui pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimediasi belanja modal maka diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat untuk menekankan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan alokasi pendapatan daerah terutama DAU ke dalam belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel mediasi terkait pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dimediasi belanja modal. Populasi penelitian adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebanyak 35 (tiga puluh lima) pemerintah daerah. Teknik Pengambilan Sampel menggunakan Teknik Pengambilan Sampel Jenuh, artinya seluruh populasi diambil sebagai sampel yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu jumlah nominal anggaran DAU dan Belanja Modal pada anggaran Tahun 2020 dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020. Penelitian bersifat *cross sectional* artinya lamanya periode amatan hanya 1 (satu) tahun. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang tersedia di Badan Pusat Statistik.. Analisis data menggunakan analisis jalur yang meliputi persamaan regresi jalur. Pengujian hipotesis menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal, DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal bukan merupakan variabel mediasi terkait pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: DAU; belanja modal; pertumbuhan ekonomi.

Abstract

This research is important to do considering the phenomenon of the proportion of capital expenditures to regional expenditures in regencies/cities in Indonesia which is still low at only 20.28%. By knowing

the effect of DAU on economic growth mediated by capital expenditures, it is hoped that it can encourage the central government to emphasize to local governments to increase the allocation of regional revenues, especially DAU into capital expenditures. This study aims to determine the effect of DAU on Economic Growth with Capital Expenditure as a mediating variable related to the effect of DAU on Economic Growth mediated by capital expenditure. The population of this research is the Regency/City in Central Java with 35 (thirty five) local governments. The sampling technique used was the Saturated Sampling Technique, meaning that the entire population was taken as a sample, namely as many as 35 districts/cities. The data collected in this study are the nominal amount of the DAU and Capital Expenditure budgets in the 2020 budget and the economic growth rate in 2020. The study is cross sectional, meaning the length of the observation period is only 1 (one) year. Research data were collected using the documentation method available at the Central Bureau of Statistics. Data analysis used path analysis which included path regression equations. Hypothesis testing using t test. The results showed that DAU had no effect on capital expenditure, DAU had no effect on economic growth, capital expenditure had no effect on economic growth and capital expenditure was not a mediating variable related to the effect of DAU on economic growth.

Keywords: DAU; capital expenditures; economic growth.

PENDAHULUAN

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa pendapatan daerah meliputi: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain dari pendapatan daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Adapun pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencakup dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan serta dana desa. Sedangkan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa dana perimbangan terdiri dari dana transfer umum dan dana transfer khusus. Pada pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan pula bahwa dana transfer umum meliputi dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Bagi sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia, dana alokasi umum (DAU) merupakan pendapatan daerah yang proporsinya paling besar dibandingkan pendapatan daerah yang lainnya. Prosentase DAU dibandingkan total pendapatan daerah rata-rata lebih dari 75%, hal ini menunjukkan DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan bagi pemerintah daerah di Indonesia. DAU adalah pendapatan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan. Kemampuan keuangan antar pemerintah daerah dan untuk mendanai kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Mengingat DAU merupakan pendapatan daerah dengan proporsi terbesar, pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan DAU ke dalam belanja daerah secara tepat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengklasifikasikan belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja modal adalah belanja dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang memenuhi kriteria masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ditegaskan pula bahwa Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan

peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan belanja daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 memiliki makna bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan belanja modal yang terkait langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan bahwa pengalokasian DAU secara tepat akan berpengaruh pada peningkatan belanja modal serta peningkatan belanja modal akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini akan menguji pengaruh DAU terhadap belanja modal dan pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi serta pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimediasi belanja modal. Penelitian tentang pengaruh DAU terhadap belanja modal sudah pernah dilakukan. Juga penelitian tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penelitian tentang pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi sudah pernah dilakukan. Penelitian sebelumnya tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) telah diteliti oleh Mawarni et al (2013). Penelitian tersebut mengkaji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan populasi adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh pada 21 kabupaten/kota (Mawarni et al., 2013). Penelitian oleh Dewi (2017) mengkaji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan populasi dalam delapan kabupaten dan satu kota di provinsi Bali . Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan variabel belanja modal sebagai variabel mediasi terkait pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Obyek penelitian adalah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bersifat *cross sectional*. Adapun periode pengamatan yaitu tahun anggaran 2020. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat fenomena proporsi belanja modal terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia yang masih rendah yaitu hanya sebesar 20,28%. Dengan mengetahui pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimediasi belanja modal maka diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat untuk menekankan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan alokasi pendapatan daerah terutama DAU ke dalam belanja modal.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori Agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* memberikan mandat kepada *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam konteks pengalokasian DAU ke dalam Belanja Modal, *principals* adalah masyarakat di daerah dan *agents* adalah pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan perangkat daerah. Pemerintah Daerah terikat kontrak dengan masyarakat di daerah yang diwakili oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat kebijakan pemerintahan daerah yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam konteks pengalokasian DAU, Pemerintah Daerah selaku *agents* seharusnya memaksimalkan pengalokasian ke Belanja Modal yang mencerminkan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan publik di daerah.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada kabupaten/kota dalam rangka menutup kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan berdasarkan

prinsip tertentu dimana daerah miskin atau terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Alokasi DAU minimal sebesar 26% dari dana APBN. Proporsi DAU bagi kabupaten dan kota sebesar 90% dan bagi provinsi sebesar 10%.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang penggunaan dan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Belanja Modal adalah pembiayaan untuk memperoleh aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan belanja modal lebih tinggi dari belanja daerah lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka makin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berlangsung secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

DAU sebagai pendapatan daerah seharusnya dialokasikan secara tepat. Ketentuan yang berlaku mengharuskan peningkatan Belanja Modal. Dengan demikian jika Pemerintah Daerah mematuhi ketentuan tersebut maka terjadi peningkatan jumlah pengeluaran untuk Belanja Modal. Hasil Penelitian Sholikhah dan Wahyudin (2014), Yawa dan Runtu (2015) dan Anggit Pratiwi (2019) menegaskan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan telaah tersebut maka hipotesis yang dirumuskan seperti berikut:

H1 : DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengalokasian DAU ke dalam Belanja Daerah terutama Belanja Modal dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Ketentuan yang berlaku menekankan bahwa Pemerintah Daerah harus meningkatkan proporsi Belanja Modal dalam penganggaran Belanja Daerah yang berkaitan langsung dengan Pertumbuhan Ekonomi. Ketentuan ini menggambarkan bahwa penganggaran Belanja Modal harus diarahkan pada terwujudnya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian Dwi Purnomo dan Wasiat (2015) dan Sri Rahayu (2017) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan telaah tersebut maka hipotesis yang dirumuskan seperti berikut:

H2 : DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Modal adalah belanja dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset tak berwujud yang memiliki manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penganggaran belanja modal seharusnya ditingkatkan dengan harapan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Belanja Modal adalah pembiayaan untuk memperoleh aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan belanja modal lebih tinggi dibandingkan belanja daerah lainnya.

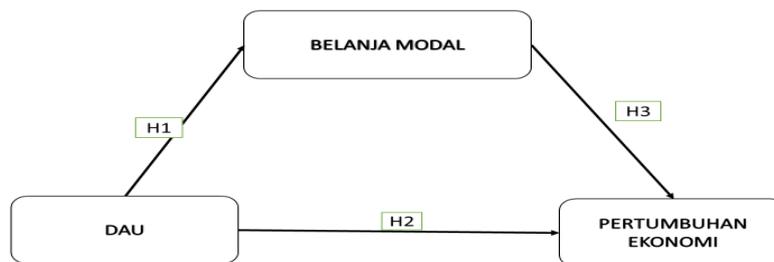
Hasil Penelitian Waryanto (2017) dan Yunus dan Amirullah (2019) menegaskan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan telaah tersebut maka hipotesis yang dirumuskan seperti berikut:

H3 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Belanja Modal merupakan Variabel Mediasi terkait Pengaruh DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil Penelitian yang dilakukan Sholikhah dan Wahyudin (2014), Yawa dan Runtu (2015) dan Anggit Pratiwi (2019) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selanjutnya hasil penelitian Waryanto (2017) dan Yunus dan Amirullah (2019) menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Adapun hasil penelitian Dwi Purnomo dan Wasiat (2015) dan Sri Rahayu (2017) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian terdahulu memberikan deskripsi bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, serta DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Deskripsi ini mengindikasikan bahwa Belanja Modal mungkin merupakan variabel mediasi terkait pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan telaah hubungan logis tersebut maka hipotesis yang dirumuskan seperti berikut:

H4 : Belanja Modal merupakan variabel mediasi terkait pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi.



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis data penelitian ini yaitu data sekunder dengan variabel penelitian merupakan variabel *observable* berskala rasio yang berarti memiliki titik origin. Data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi. Desain penelitian ini merupakan model regresi sederhana dan regresi berganda yang bertujuan menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yaitu variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan model prediksi yang bertujuan mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Populasi penelitian ini yaitu kabupaten/kota di Jawa Tengah sebanyak 35 (tiga puluh lima) pemerintah daerah. Keseluruhan populasi diambil sebagai sampel yang berarti menggunakan Teknik Penyampelan Jenuh artinya seluruh populasi dijadikan sampel. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu jumlah nominal anggaran DAU dan Belanja Modal pada anggaran Tahun 2020 dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020. Penelitian bersifat *cross sectional* artinya lamanya periode amatan hanya 1 (satu) tahun. Adapun model persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu:

- Persamaan Regresi Jalur ke-1
 $BM = \alpha + \beta \text{ DAU} + e_1$
- Persamaan Regresi Jalur ke-2
 $PE = \alpha + \beta_1 \text{ DAU} + \beta_2 \text{ BM} + e_2$

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan *Path Analysis* yaitu melakukan analisis jalur terhadap persamaan regresi jalur kesatu dan juga terhadap persamaan regresi jalur kedua. Analisis jalur terhadap persamaan regresi jalur kesatu untuk mengetahui signifikansi pengaruh DAU terhadap Belanja Modal. Adapun analisis jalur terhadap persamaan regresi jalur kedua untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial DAU dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji t. Apabila hasil analisis jalur terhadap persamaan regresi jalur kesatu dan persamaan regresi jalur kedua menunjukkan adanya signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji Sobel yang fungsinya untuk mengetahui apakah Belanja Modal merupakan variabel mediasi. Namun apabila hasil analisis jalur terhadap persamaan regresi jalur kesatu dan/atau persamaan regresi jalur kedua memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen maka tidak perlu melakukan Uji Sobel karena sudah dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal bukan merupakan variabel mediasi. Pengolahan data untuk menyusun persamaan regresi jalur kesatu dan persamaan regresi jalur kedua serta untuk menguji hipotesis menggunakan software SPSS versi 23. Adapun untuk Uji Sobel untuk menguji bahwa Belanja Modal sebagai variabel mediasi terkait pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi menggunakan Microsoft Excel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Statistik

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu mendokumentasikan data nominal anggaran DAU, nominal anggaran Belanja Modal dan tingkat Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Tabel 1 berikut ini menyajikan Deskripsi Statistik Variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1
Deskripsi Statistik Variabel

Variabel	N	Min	Max	Mean	Deviasi Standar
DAU	3	143.703.600.0	1.423.200.000.0	964.663.131.0	284.776.408.0
	5	00	00	00	00
Belanja Modal	3	165.983.000.0	1.054.761.000.0	380.912.285.0	174.208.577.0
	5	00	00	00	00
Pertumbuhan Ekonomi	3	2,33	6,32	5,42	0,78
	5				

Sumber: Data diolah tahun 2020

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimal DAU sebesar Rp143.703.600.000. dan nilai maksimalnya sebesar Rp1.423.200.000.000. serta deviasi standar Rp284.776.408.000.

Sedangkan nilai minimal Belanja Modal sebesar Rp165.983.000.000. dan nilai maksimal Belanja Modal sebesar Rp1.054.761.000.000. serta deviasi standar sebesar Rp174.208.577.000. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai minimal 2,33 dan nilai maksimal 6,32 serta deviasi standar 0,78.

Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji signifikansi hubungan jalur yang menegaskan pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Dikarenakan nilai DAU dan Belanja Modal memiliki digit lebih dari 9 maka nilai variabel DAU dan variabel Belanja Modal ditransformasikan ke dalam Logaritma 10. Pengujian signifikansi hubungan jalur mencakup analisis jalur terhadap persamaan regresi jalur ke-1 dan persamaan regresi jalur ke-2. Sedangkan untuk pengujian pengaruh mediasi menggunakan Uji Sobel. Kriteria pelaksanaan Uji Sobel yaitu apabila pengujian signifikansi hubungan jalur pada persamaan regresi jalur ke-1 maupun persamaan regresi jalur ke-2 menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Signifikansi hubungan jalur diketahui dengan membandingkan nilai signifikansi dari masing-masing hubungan jalur tersebut (Koefisien Jalur) dengan *level of significance* sebesar 5%. Tabel 2 berikut ini menunjukkan Nilai Signifikansi dari hubungan jalur dalam Persamaan Regresi Jalur Ke-1.

Tabel 2
Nilai Signifikansi Persamaan Regresi Jalur Ke-1

Variabel Independen	Variabel Dependen	Nilai Signifikansi
DAU	Belanja Modal	0,04

Sumber: Data diolah

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui melalui Nilai Signifikansi dari Koefisien Jalurnya. Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sebagaimana tercermin pada nilai signifikansi sebesar 0,04 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian H_1 diterima. Nilai Signifikansi dari hubungan jalur dalam Persamaan Regresi Jalur Ke-2 disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Nilai Signifikansi Persamaan Regresi Jalur Ke-2

Variabel Independen	Variabel Dependen	Nilai Signifikansi
DAU	Pertumbuhan Ekonomi	0,299
Belanja Modal		0,773

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana tercermin pada nilai signifikansi sebesar 0,299 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian H_2 ditolak. Dari Tabel 3 di atas bisa diketahui pula bahwa H_3 juga ditolak yang berarti Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sebagaimana tercermin pada nilai signifikansi sebesar 0,773 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Karena hasil uji Hipotesis ke-2 dan Hipotesis ke-3 menunjukkan bahwa DAU dan Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka tidak

dilakukan Uji Sobel untuk menguji Belanja Modal sebagai variabel mediasi terkait pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sebab dari hasil pengujian hipotesis ke-2 dan hipotesis ke-3 sudah dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal bukan variabel mediasi dalam pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian H₄ ditolak.

Analisis Persamaan Regresi

Melalui pengolahan data menggunakan Software SPSS versi 23 disusun Tabel 4 dan Tabel 5 yang menunjukkan nilai konstanta dan koefisien variabel independen pada Persamaan Regresi Jalur kesatu dan Persamaan Regresi Jalur kedua.

Tabel 4
Nilai Konstanta dan Koefisien Variabel Independen
Persamaan Regresi Jalur Ke-1

Variabel Independen	Variabel Dependen	Konstanta	Koefisien
DAU	Belanja Modal	7,516	0,337

Sumber: Data diolah

Tabel 5
Nilai Konstanta dan Koefisien Variabel Independen
Persamaan Regresi Jalur Ke-2

Variabel Independen	Variabel Dependen	Konstanta	Koefisien
DAU	Pertumbuhan Ekonomi	17,711	-0,806
Belanja Modal			-0,230

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5 dapat disusun:

- Persamaan Regresi Jalur Ke-1 yaitu:
 $BM = 7,516 + 0,337 DAU + e_1$
- Persamaan Regresi Jalur Ke-2 yaitu:
 $PE = 17,771 - 0,806 DAU - 0,230 BM + e_2$

dimana:

DAU : Dana Alokasi Umum
BM : Belanja Modal
PE : Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini tidak selaras dengan hubungan logis antar variabel bahwa DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hipotesis kedua ditolak disebabkan data menunjukkan bahwa terdapat pola hubungan yang bertentangan antar Kabupaten/Kota terkait nilai nominal DAU dan tingkat Pertumbuhan Ekonomi. Kabupaten Wonogiri, Kabupaten

Grobogan dan Kabupaten Magelang memiliki DAU dengan nilai nominal yang lebih tinggi namun tingkat Pertumbuhan Ekonominya lebih rendah dibandingkan Kota Tegal, Kota Pekalongan dan Kota Salatiga yang memiliki DAU dengan nilai nominal yang lebih rendah namun tingkat Pertumbuhan Ekonominya lebih tinggi. Pola hubungan yang bertentangan tersebut menjelaskan penyebab variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, karena agar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen membutuhkan pola hubungan yang sinergis. Dalam konteks pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi, pola hubungannya adalah bertentangan sehingga hipotesis kedua ditolak. Tabel 6 berikut ini menggambarkan pola hubungan yang bertentangan sebagaimana diuraikan di atas.

Tabel 6
Pola Hubungan DAU dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pemerintah Daerah	Nilai Nominal DAU	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Keterangan
Kabupaten Wonogiri	1.181.037.000.000	5,14	
Kabupaten Grobogan	1.144.561.000.000.	5,37	DAU lebih besar, PE lebih kecil
Kabupaten Magelang	1.097.367.000.000.	5,30	
Kota Tegal	502.969.000.000.	5,77	
Kota Pekalongan	475.842.000.000.	5,50	DAU lebih kecil, PE lebih besar
Kota Salatiga	469.967.000.000.	5,84	

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian hipotesis ke-3 menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini tidak selaras dengan hubungan logis antar variabel bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Waryanto (2017) maupun Yunus dan Amirullah (2019) juga menegaskan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penjelasan mengenai penyebab bahwa hipotesis ke-3 ditolak yaitu data variabel Belanja Modal dan variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan pola hubungan yang bertentangan antar Kabupaten/Kota. Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Blora memiliki Belanja Modal dengan nilai nominal yang lebih tinggi namun tingkat Pertumbuhan Ekonominya lebih rendah dibandingkan Kota Salatiga, Kabupaten Sragen dan Kota Tegal yang memiliki Belanja Modal dengan nilai nominal yang lebih rendah namun tingkat Pertumbuhan Ekonominya lebih tinggi. Pola hubungan yang bertentangan ini menjelaskan mengenai penyebab bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sebab agar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen membutuhkan pola hubungan yang sinergis. Dalam konteks pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, pola hubungannya adalah bertentangan sehingga hipotesis ke-3 ditolak. Tabel 7 berikut ini menggambarkan pola hubungan yang bertentangan sebagaimana diuraikan di muka.

Tabel 7
Pola Hubungan Belanja Modal (BM) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pemerintah Daerah	Nilai Nominal Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Keterangan
Kabupaten Cilacap	663.321.000.000.	2,33	
Kabupaten Wonogiri	565.092.000.000.	5,14	BM lebih besar, PE lebih kecil
Kabupaten Blora	466.887.000.000.	4,05	
Kota Salatiga	183.725.000.000.	5,84	
Kabupaten Sragen	167.598.000.000.	5,90	BM lebih kecil, PE lebih besar
Kota Tegal	165.983.000.000.	5,77	

Sumber: Data diolah

Penelitian ini tidak mampu menegakkan Model Penelitian yang disusun yaitu menggunakan Belanja Modal sebagai variabel mediasi terkait pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dari hasil pengujian hipotesis ke-2 dan hipotesis ke-3 dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal bukan variabel mediasi terkait pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dimungkinkan karena jumlah data atau N data yang masih sangat sedikit yaitu hanya 35 data. Dari hasil pengujian hipotesis sebagaimana diuraikan di muka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-1 dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014), Yawa dan Runtu (2015) dan Anggit Pratiwi (2019). Sedangkan hasil pengujian hipotesis ke-2 dalam penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Dwi Purnomo dan Wasiat (2015) dan Sri Rahayu (2017). Demikian juga hasil pengujian hipotesis ke-3 dalam penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2017) dan Yunus dan Amirullah (2019).

PENUTUP

Dari uraian di muka, dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi serta DAU tidak berpengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian untuk Belanja Modal bukan merupakan variabel mediasi terkait pengaruh variabel DAU terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini mencakup wilayah yang belum luas yaitu hanya kabupaten/kota di Jawa Tengah, maka bagi penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah misalnya kabupaten/kota di Indonesia sehingga hasil penelitiannya dapat digeneralisir. Penelitian ini bersifat *cross sectional* yaitu periode amatan hanya selama 1 tahun anggaran, maka bagi penelitian selanjutnya disarankan periode amatan bersifat *time series* yaitu periode amatan untuk beberapa tahun. Dengan demikian menggunakan data yang bersifat *pooling data* yang berarti jumlah data atau N data lebih banyak sehingga hasil penelitian lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggit Pratiwi, Nisa. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah MEA* Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus Tahun 2019. Hal. 105-120.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2019/2020* Buku 1 (Sumatera, Jawa).
- Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Global Journal*, 1(1), 1745–1773. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3321>
- Dwi Purnomo, Adi dan Wasiat, Erpin. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis* Vol. 3 No. 2 Tahun 2015. Hal 85-98.
- Ghozali, Imam. 2016. *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Semarang : Penerbit PT. Yoga Pratama.
- Ghozali, Imam. 2017. *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M dan Meckling, W. 1976. *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure*. *Journal of Finance Economic* 3. 305-360.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Mawarni, Darwanis, & Syukriy, A. (2013). Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2*, (November 2019), 80–90.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tahun 2014. Sekretariat Negara RI di Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42 Tahun 2019. Sekretariat Negara RI di Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran*

- 2020.. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 655 Tahun 2019. Sekretariat Negara RI di Jakarta.
- Pramessti, Getut. 2016. Statistika Lengkap Secara Teori dan Aplikasi dengan SPSS 23. Jakarta : PT. Elex Media Elex.
- Rahayu, Sri. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon Tahun 2008-2015. UIN-IR (Universitas Islam Negeri – Institutional Repository) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Sholikhah, Imroatus dan Wahyudin, Agus. 2014. Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 3 No. 4 November 2014. Hal. 553-562.
- Sujarweni, Wiratna. 2019. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Waryanto, Puput. 2017. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* Vol. 2 No. 1 Juni Tahun 2017. Hal. 35-55.
- Yunus, Said dan Amirullah. 2019. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh). *Jurnal Samudra Ekonomika* Vo. 3 No. 2 Tahun 2019. Hal 186-195.